

**LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT MANDIRI**



**PENGUATAN SALBIA SEBAGAI ALTERNATIF NETRALITAS  
BIROKRASI (ASN, KEPALA DESA BESERTA PERANGKAT DESA) DI  
KECAMATAN TAPA DAN KECAMATAN BULANGO UTARA  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**OLEH**

**Ketua Tim**

**Dr. RAMLI MAHMUD, S.Pd.,M.A**

**NIP. 198205032015041002**

**Anggota 1**

**Dr. UDIN HAMIM, S.Pd, SH, M.Si**

**NIP. 197608142002121001**

**Anggota 2**

**ZULFIKAR ADJIE, S.Pd, M.Pd**

**NIP. 199302072024211001**

**JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN**

**PROGRAM STUDI PPKn**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TAHUN 2023**

SISTEM INFORMASI PENGABDIAN  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN MANDIRI 2024**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Judul Kegiatan                    | : Penguatan Salbia sebagai alternatif netralitas birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango |
| 2. Lokasi                            | : Kabupaten Bone Bolango  |
| 3. Ketua Tim Pelaksana               |   |
| a. Nama                              | : Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., MA   |
| b. NIP                               | : 198205032015041002  |
| c. Jabatan/Golongan                  | : Lektor / 3 c  |
| d. Program Studi/Jurusan             | : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan   |
| e. Bidang Keahlian                   | :   |
| f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail    | : 082189200922 / ramlimahmud33@ung.ac.id  |
| g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail     | : -   |
| 4. Anggota Tim Pelaksana             |   |
| a. Jumlah Anggota                    | : 2 orang   |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian  | : Dr. Udin Hamim, S.Pd, M.Si /  |
| c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian | : Zulfikar Adje, S.Pd., M.Pd /  |
| d. Mahasiswa yang terlibat           | : -   |
| 5. Lembaga/Institusi Mitra           |   |
| a. Nama Lembaga / Mitra              | : BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO  |
| b. Penanggung Jawab                  | : -   |
| c. Alamat/Telp./Faks/Surel           | : -   |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (km)     | : -   |
| e. Bidang Kerja/Usaha                | : -   |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan          | : - bulan   |
| 7. Sumber Dana                       | : Biaya Sendiri   |
| 8. Total Biaya                       | : Rp. 2.500.000,-   |

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
  
 (Dr. Drs. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si)  
 NIP. 196602161997031001

Mengesahkan  
 Kepala FPM UNG  
  
 (Prof. Dr. Hidayatullah Amali, S.Kom., P.Kom., Ph.D)  
 NIP. 197201021998022001

Gorontalo, 8 November 2024  
 Ketua

  
 (Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., MA)  
 NIP. 198205032015041002

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN .....	ivv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Deskripsi Potensi Wilayah .....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya .....	3
1.3 Teknologi/Metode yang Digunakan .....	4
1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra .....	4
1.5 Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya .....	5
BAB II.....	6
TARGET DAN LUARAN.....	6
BAB III .....	7
METODE PELAKSANAAN.....	7
3.1 Persiapan .....	7
3.2 Pelaksanaan .....	7
3.3 Kelayakan Perguruan Tinggi.....	8
JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN .....	9
4.1 Anggaran Biaya.....	9
4.2 Jadwal Kegiatan.....	9
4.3 Tempat Kegiatan .....	10
BAB V.....	11
HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	11
BAB VI .....	16
PENUTUP.....	17
7.1 Kesimpulan.....	17
7.2 Saran.....	17
7.3 Ucapan Terima Kasih.....	17
Daftar Pustaka .....	18
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	20

## **RINGKASAN**

Salbia sebagai nilai luhur yang bersandarkan pada adat istiadat dapat dijadikan sebagai alternatif internalisasi sikap birokrasi (ASN, Kepala Desa, perangkat desa) untuk menjaga netralitas dalam Pemilu. Salbia juga sebagai agenda kontekstual dan dapat dipraktekkan melalui praktek birokrasi modern dalam narasi demokrasi lokal. Pengabdian ini bertujuan 1) Identifikasi masalah kerawanan pelanggaran Pemilu yang terjadi disekitar lingkungan Birokrasi, 2) Membangun kesadaran birokrasi untuk tetap berihktiar atas jenis pelanggaran Pemilu. 3) Memberikan penguatan atas penerapan nilai Salbia sebagai alternatif netralitas birokrasi dalam Pemilu. 4) sebagai sarana pendidikan politik untuk penguatan preferensi politik birokrasi menjadi pemilih cerdas dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024. Melalui pengabdian ini, birokrasi dapat aktif secara massif dalam melakukan pengawasan partisipatis menjelang Pemilu serentak tahun 2024.

***Kata Kunci : Salbia, Alternatif, Netralitas, Birokrasi, Pemilu***

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Deskripsi Potensi Wilayah**

Temuan (Gehlbach & Simpser, 2015) mengemukakan bahwa kepatuhan birokrasi seringkali penting untuk kelangsungan hidup politik, namun memunculkan kepatuhan dalam lingkungan yang dilembagakan secara lemah mengharuskan pelaku politik meyakinkan agen bahwa kekuasaan mereka pada kekuasaan aman, dengan memanipulasi kekuasaan dapat mendorong seorang birokrat untuk bekerja atas nama penguasa. Dengan demikian, (Ndraha, 1989) dan (Surie, 1987) mengemukakan bahwa praktik administratif dalam lingkungan masyarakat tertentu berbeda dengan praktek di masyarakat lain. Hal ini sangat beralasan karena administrasi sebagai subsistem sosial terdapat keterkaitan atau ketergantungan yang erat dengan masyarakat, begitupun sebaliknya

Bacaan (Pamudji, 1993), (Gie, 1992) dan (Siagian, 1995) dalam pandangannya tentang ekologi administrasi publik mengemukakan lingkungan sistem administrasi publik ditentukan oleh lingkungan fisik alamiah dan faktor sosial kemasyarakatan. lingkungan kontekstual bukan merupakan bagian dari administrasi publik namun sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan administrasi dalam mencapai tujuan. Artinya, bahwa ekologis masyarakat dapat merepresentasikan sifat dan ruang lingkup praktek penyelenggaraan administrasi public. Ikhtiar yang dikemukakan oleh (Riggs, 1996) tersebut menunjukkan bahwa dalam praktek administrasi publik tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda antara aspek nilai sosial budaya yang menjadi patokan dalam suatu negara pastilah berbeda. Bacaan tersebut juga menunjukkan bahwa, sebagai negara berkembang Indonesia mengalami permasalahan kompleks antara penerapan praktek administrasi publik dalam mengakumulasi nilai ideal rasional Weberian dengan aspek ekologis kontekstualnya Indonesia yang Pluralisme atau dikenal dengan masyarakat multikultural.

Dalam pandangan ini, (Koentjaraningrat, 2000) mengemukakan bahwa nilai budaya lokal di Indonesia dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan bangsa. Temuan (Porter & Rogowski, 2018) bawah partisan yang

tergolong dalam Birokrasi pemerintahan tidak dapat terlepas dari sisi budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. (Mahmud, et al., 2022) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi dalam Pemilu cenderung dalam pendekatan perilaku sosiologis dan identifikasi partai, faktor kepala daerah menjadi pertimbangan utama ASN dan perangkat desa dalam mendukung calon tertentu. Selain itu temuan (Mahmud, et al., 2022) juga menunjukkan bahwa budaya politik partisipan bagi kalangan birokrasi masih jarang di temui pada setiap Pemilu. Hamir Sebagian besar birokrasi di daerah lebih pada perspektif budaya politik patrokial dan kaula.

Bagi masyarakat Gorontalo, lingkungan kontekstual sangat berkaitan erat dengan *Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah*. Pada rana ini, paradigma administrasi publik tidak bisa terlepas dari lingkungan kontekstual dimana administrasi publik dipraktekkan. Temuan serta teori seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya mengisyaratkan bahwa perilaku birokrasi di daerah tidak bisa terlepas dari praktek kontekstualnya. Temuan (Baruadi, 2012) mengemukakan dalam sistem pemerintahan Gorontalo, mewajibkan sifat-sifat Allah sebagai sifat dan sikap semua aparat kerajaan mulai dari pejabat tertinggi sampai dengan dengan jabatan terendah. Hal yang sama dikemukakan oleh (Haga, 1981) mengemukakan bahwa kekuasaan dimiliki raja tidaklah mutlak. Representasi rakyat melalui lembaga adat (*bate*) mempunyai kewenangan untuk memecat raja sebagai penguasa jika dalam menjalankan kekuasaannya tidak sesuai dengan ketentuan adat.

Dengan demikian, konsep *Salbia* mereduksi nilai baik adat maupun agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, konsep *salbia* menurut Hakiki (2011:113) adalah sifat sifat yang menolak yang tidak layak bagi Allah. Sementara itu, (Atabik, 2014) mengemukakan bahwa *salbia* adalah sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Zat Allah. Pada konteks ini (Niode, 2007) mengemukakan bahwa sifat *salbia* bagi kekuasaan masyarakat Gorontalo dalam bentuk adat adalah penindakan. Artinya dalam menjalankan kekuasaan baik kepala daerah maupun birokrasio harus sesuai dengan ketentuan atau kaidah norma yang berlaku serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan sifat Allah.

Konstruksi ini menandakan bahwa argumentasi akan definisi *salbia* dalam perilaku politik menggambarkan adanya kepatuhan sekaligus secara simultan atau general pada objek (ASN) pada Pemilihan Umum. Dalam pandangan adat Gorontalo, perilaku penindakan (*salbia*) terbagi atas a) *qidam* (kesetiaan dan kepatuhan) b) sifat *baqaa* (kekal tidak musnah) melaksanakan hukum, tidak memilih pihak atau dipengaruhi oleh satu aliran politik c. *sifat mukhalafatu lil hawaditsi* (berlainan dengan mahluk), maharaja diberikan sifat ini sehingga berhak beroleh kehormatan. Tetapi jika bertindak seperti manusia biasa yang jahat (marah, benci, rakus, penipu, mencuri, berzina dan lainnya) maka dihukum lebih berat bagi manusia biasa. d) *qiyamuhu binafsihi* (berdiri pada pendapat sendiri) mempunyai pendapat sendiri, tidak meniru, tidak menerima bisikan atau hasutan, (Niode, 2007)

Berangkat dari apa yang telah dikemukakan di atas, *Salbia* dapat dijadikan pegangan dalam membentengi aparatur birokrasi dalam menjaga independensi dan netralitasnya dalam Pemilu serentak tahun 2024. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka, terdapat beberapa ulasan mendasar tentang dukungan potensi pelaksanaan pengabdian ini antara lain :

1. Terdapat sikap/sifat lahiriah ke-Gorontalo-an yakni nilai *Salbia* yang dapat dijadikan rujukan bagi birokrasi menjelang Pemilu 2024
2. Adanya dukungan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait giat penguatan preferensi politik ASN, Kepala desa beserta perangkatnya untuk netral dalam Pemilu
3. Adanya dukungan ASN dalam Kepala Desa serta Camat dalam pelaksanaan pengabdian.
4. Adanya keinginan bagi semua stakeholder termasuk KPU dan Bawaslu dalam mendorong netralitas ASN, Kepala Desa beserta perangkat di Provinsi Gorontalo.

## **1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya**

Terdapat beberapa masalah sebagai faktor yang cenderung membuat birokrasi di daerah tidak netral, diantaranya adalah kepatuhan dan kesetiaan kepada atasan, motif karir, ikatan kekerabatan dengan calon, serta faktor tim sukses, pasangan calon, atasan serta pengaruh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini

Kepala Daerah membuat kelompok birokrasi di daerah sulit untuk netral dan memilih untuk memihak kepada calon tertentu. Merujuk pada masalah tersebut maka, metode penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan pengabdian dengan tema Penguatan Nilai Salbia sebagai alternatif Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) Menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango”.

### **1.3 Teknologi/Metode yang Digunakan**

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini mencakup :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan netralitas birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.
- b. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi penguatan Penguatan Nilai Salbia sebagai alternatif Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.

### **1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra**

Kelempok mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah Bawaslu kabupaten Bone Boilango, Panwascam Kabupaten Tapa dan Kecamatan Bulango Utara beserta pemerintah kecamatan dikedua wilayah dimaksud. Observasi awal dari kelompok mitra dalam memitigasi kerawanan Pemilu khususnya di kabupaten Bopane Bolango mengalami ancaman serius dari segi mobilisasi birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dalam memenangkan pasangan calon tertentu. Atas kebutuhan tersebut, kelompok mitra dan PT dalam hal ini Jurusan IHK/PPKn sama berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang Penguatan Nilai Salbia sebagai alternatif Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)) menjelang Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Bone Bolango yang bertempat di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara.

### 1.5 Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASN yang berdomisili di Kecamatan Botupingge dan Kecamatan Suwawa Selatan</li> <li>- Kepala Desa beserta Perangkat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan kelompok mitra terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi</li> <li>- Terdapat kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk lembaga perguruan tinggi dalam memberikan Pendidikan politik termasuk kelompok birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pengetahuan dan peran Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) tentang agenda netralitas politik dalam Pemilu</li> <li>b. Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) Siswa kurang menyadari perannya sebagai kelompok independent dalam Pemilu</li> <li>c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu khususnya netralitas birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa)</li> </ul>

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

Terdapat beberapa target dalam proses pelaksanaan pengabdian ini, antara lain :

1. Identifikasi masalah menyangkut dengan kerawanan pelanggaran Pemilu yang terjadi disekitar Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa).
2. Membangun kesadaran Birokrasi untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu
3. Memberikan Penguatan Netralitas Politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dalam Pemilu
4. Penguatan preferensi politik kepada Birokrasi (ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa) menjadi pemilih cerdas dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024

Berdasarkan pada target kegiatan tersebut di atas, luaran kegiatan ini mencakup

1. Laporan hasil pengabdian kepada pihak terkait
2. Jurnal Ilmiah
3. HKI

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Persiapan

Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango
2. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan
3. Persiapan sarana spanduk dan materi penyuluhan/ sosialisasi
4. Pelaksanaan pengabdian
5. Laporan Pengabdian
6. Penebitan Jurnal dan HKI

#### 3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan seara tatap muka siswa SMA Negeri 11 Kabupaten Gorontalo Utara dengan pelaksana program maupun narasumber dalam kegiatan ini adalah :

No	Materi	Narasumber	Tempat
1	Penguatan Nilai Salbia sebagai Alternatif Netraliras AS, Kepala Desa beserta perangkat Desa	Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, M.A	Aula BPU Kecamatan Tapa.
2	Regulasi Teknis Terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sofyan Djama, S.Pd	Aula BPU Kecamatan Tapa.

#### a. Rencana Keberlanjutan Program

Rencana keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah Bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan lembaga *Ad Hoc* serta pihak Pemerintah Kecamatan untuk melakukan pendampingan secara berkala kepada ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa serta mengaktifkan dan mendorong birokrasi ditingkat kecamatan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi dan penggunaan media sebagai sarana pengawasan Partisipatif menjelang Pemilu 2023.

### **3.3 Kelayakan Perguruan Tinggi**

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi tugas pokok bagi Lembaga Perguruan Tinggi, dimana pengabdian masyarakat adalah bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kaitannya dengan hal tersebut, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi. PPKn FIS UNG perlu melakukan kegiatan dimaksud karena berhubungan dengan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memenuhi tuntutan kurikulum diantaranya adalah mata kuliah Pemilu dan Sistem Kepartaian, Demokrasi dan HAM, Sistem Pemerintahan Daerah serta Sistem Politik Indonesia

## BAB IV

### JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN

#### 4.1 Anggaran Biaya

Uraian Kegiatan		Vol	Satuan	Harga	Jumlah
<b>1</b>	<b>Honorarium</b>	1	Org	500.00 0	500.000
<b>2</b>	<b>Bahan Habis Pakai</b>				
	Spanduk	1	Buah	200.00 0	200.000
	Kertas HVS A4 70 Gram	1	Rim	35.000	35.000
	Konsumsi Berat	30	Org	25.000	750.000
	Konsumsi Ringan	30	Org	10.000	300.000
<b>3</b>	<b>Perjalanan</b>				
	Survei Awal	2	Org	50.000	100.000
	Pelaksanaan Kegiatan	4	Org	50.000	200.000
<b>4</b>	<b>Lain-Lain</b>				
	Penyusunan, Pengandaan dab Penjilidan	3	Eks	15.000	15.000
	Penerbutan Jurnal	1	Jurnal	400.00 0	400.000
<b>Jumlah</b>					2.500.00 0

**Terbilang :**

*(Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah)*

#### 4.2 Jadwal Kegiatan

1	JENIS KEGIATAN	BULAN					
		Agustus		September		Oktober	
		Minggu		Minggu		Minggu	
		III	IV	I	III	I	II

2	Persiapan	■	■				
3	Koordinasi		■	■			
3	Penulisan dan Pengajuan Proposal			■	■		
4	Pelaksanaan				■		
5	Laporan					■	
6	Jurnal						■

### 4.3 Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Aula Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango SMA

## BAB V

### HASIL YANG TELAH DICAPAI



Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Alternatif Salbia Sebagai Penguatan Netralitas Birokreasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Tapa dan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama (LOA) Fakultas Ilmu Sosial dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo No. 3450/UN47.B2/HK07/2023) dengan Impelmentasi Kerjasama (IA) antara Jurusan

Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) Prodi. PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo No..... Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan pemerintah kecamatan. Dimana, kegiatan tersebut menjadi Solusi bagi permasalahan yang sering di hadapi oleh ASN maupun pemerintah desa setiap pelaksanaan Pemilu.

Isu mengenai hal tersebut bukan hanya menjadi masalah kontestasi politik di aras lokal, akan tetapi menjadi masalah nasional yang tidak ada penyelesaiannya. Keberadaan Birokrasi (ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa) dalam Pemilu sangat efektif dalam mendulang suara baik partai politik maupun pasangan calon. Khusus untun ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai yang dirilis (Kompas, 2021) dan (KASN, 2024) menunjukkan terdapat 2.341 kasus pelanggaran netralitas ASN baik Pilkada maupun Pemilu. Diantaranya terdapat 55 kasus pada tahun 2017, 508 kasus di tahun 2018, 412 kasus di tahun 2019, 1399 kasus pada tahun 2020 dan 417 kasus laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Sementara itu untuk aparat pemerintah desa (Kompas, 2023) mengemukakan terdapat potensi pelanggaran aparat desa atas dukungan politiknya melalui kegiatan Asosiasi Perangkat Desa (APDESI) pada pasangan Presiden dan wakil Presiden.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa permasalahan netralitas birokrasi sebagai aparatur negara harus dicarikan formula untuk mengentengari independensi mereka dalam Pemilu. Sesuai dengan metode pengabdian, sebelum pelaksanaan sosialisasi Langkah pertama yang dilakukan oleh pelaksana adalah mengukur tingkat pemahaman perilaku peserta sosialisasi terhadap perilaku politik mereka menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Bone Bolango. Hasil olah data berdasarkan penyebaran angket melalui *Google Form* menunjukkan bahwa motif dukungan birokrasi di kecamatan Tapa dan Bolango Utara terdiri atas Ketaatan 96 %, Kepatuhan, 98 %, dan kesetiaan kepada atasan (*Tau'wa*) 96 %. Preferensi tersebut menunjukkan bahwa netralitas aparatur birokrasi sulit di capai jika ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan terhadap *Tau'wa* (pemimpin/atasan) menjadi prioritas mereka.



Atas hal tersebut, tipe ideal birokrasi Weberian dalam (Albrow, 2012) dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam memahami preferensi politik birokrasi. Ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan merupakan bentuk dari tipe ideal birokrasi Weber, diantaranya terdapat pribadi yang menjalankan tugas-tugas yang impersonal sesuai dengan jabatan mereka, terdapat hirarki jabatan yang jelas dan pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Ketiga tipe ideal rasional tersebut jika dikonstruksikan dengan temuan pengabdian dapat disimpulkan bahwa ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan merupakan bagian dari implementasi tugas impersonal berdasarkan hirarki jabatan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan sistem birokrasi yang dijalankan.

Berdasarkan rujukan tersebut diatas, alternatif ekologi administrasi menjadi penting untuk mentengarai permasalahan netralitas aparatur birokrasi dalam Pemilu. Bacaan (Riggs, 1996), (Pamudji, 1993), (Gie, 1992) dan (Siagian, 1995) telah memberikan pandangan bahwa lingkungan kontekstual dapat direduksi untuk penguatan birokrasi dalam menjalankan prakteknya. Atas hal tersebut, apa yang dikemukakan oleh (Koentjaraningrat, 2000) mengemukakan bahwa nilai



budaya lokal di Indonesia dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan bangsa termasuk penyelenggaraan Pemerintahan dalam negara demokrasi. Dalam konteks ini, alternatif melalui penguatan perilaku salbiya yang berlandaskan pada *Adat Duluo Limo Lo Pohala* dengan kontstruksi perilaku salbiya dapat dijadikan muatan nilai Bagi aparatur birokrasi dalam menjaga netralitasnya disetiap Pemilu.

(Hamim & Mahmud, 2022) mengemukakan bahwa Perilaku salbiyah merupakan perilaku yang memuat penegasan atau peringatan kepada ASN agar tidak menyamakan seorang kepala daerah dengan Tuhan. Nilai kearifan yang dimaksud yaitu perilaku salbiyah yang terdiri atas ketaatan dan kepatuhan, keteguhan prinsip, konsisten terhadap aturan, serta ta' uwa. Rujukan dari temuan data lapangan atas ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan yang membuat aparatur birokrasi cenderung tidak netral merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kontekstual adat Gorontalo. Namun demikian, harus digarisbawahi bahwa ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan menurut (Niode, 2007) dalam konteks adat Gorontalo terdapat nilai kepantasan yang diberikan oleh aparatur birokrasi. Kepantasan harus berdasarkan pada nilai adat dan hukum formal negara, artinya tidak melanggar aturan yang berlaku baik adat maupun hukum negara.

Atas hal tersebut, muatan materi dalam sosialisasi lebih fokus pada penguatan nilai Salbiya sebagai alternatif netralitas aparatur birokrasi di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara. Penguatan niai Salbiyah yang dimaksudkan

antara lain, *Pertama*, Ketaatan dan kepatuhan ASN kepada kepala daerah maupun atasan tentu memiliki konsekuensi diantaranya yaitu tidak menyalahi hukum formal negara dan *Adat Limo Lo Pohalaa*. Ketaatan dan kepatuhan diberikan bagi kepantasan tertentu. Tidak selamanya perintah harus dijalankan jika bertentangan dengan norma adat dan hukum formal negara. Artinya jika aparatur birokrasi diperintahkan untuk mendukung partai atau calon tersebut maka wajib bagi aparatur birokrasi untuk menolak dan tidak melakukan perintah dimaksud. *Kedua* keteguhan prinsip, merepresentasikan kepentingan ASN yang mengarah pada norma adat sebagai dasar bagi ASN dalam bersikap. Dalam menggunakan hak politik harus representasi kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada pertimbangan logis.

*Ketiga* konsisten terhadap aturan, aparatur birokrasi harus tunduk terhadap semua konsekuensi hukum yang mengatur tentang pola perilaku aparatur birokrasi (ASN, Aparatur Desa) Menjelang Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bone

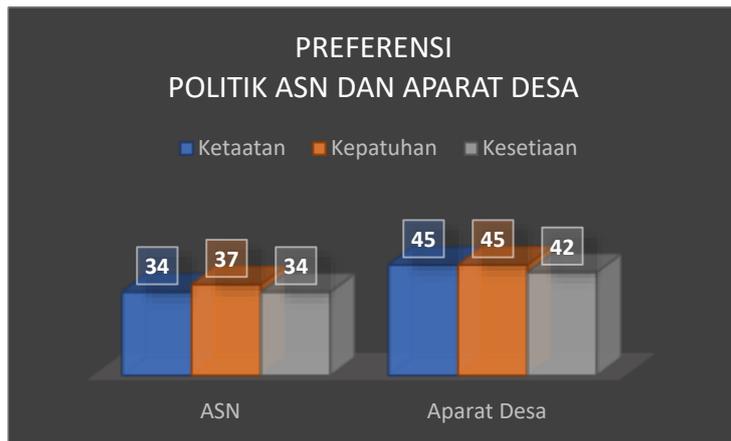
Bolango. Sifat baqa dalam konteks adat Gorontalo telah mencerminkan nilai netralitas ASN seperti yang tertuang dalam ketentuan hukum serta regulasi lain yang mengatur tentang netralitas birokrasi dalam Pemilu. *Keempat*, peran *ta'uwa* (Kepala Desa) merupakan konsep



kepemimpinan yang dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *datahu lo huntu huidu* (daratan menjunjung gunung). Artinya konsep *ta'uwa* mengatur tentang perilaku pemerintahan baik yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun ASN. *Ta'uwa* akan menjaga dan merawat norma adat karena representasi dari sifat tersebut akan membentuk perilaku rasional ASN dalam menentukan pilihan.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, pelaksana pengabdian mengedarkan kemali kuesioner melalui *google form* sebagai tahapan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. adapun olahan data hasil kuesioner dapat dilihat pada gambar berikut :

Perolehan hasil data dalam pengabdian ini menunjukkan terdapat keberhasilan dalam pelaksanaannya. Data awal menunjukkan bahwa preferensi aparatur birokrasi yang



cenderung membuat aparatur birokrasi tidak netral dalam pemilu dikarenakan aspek ketaatan sebanyak 96 %, akan tetapi setelah pelaksanaan sosialisasi menjadi 34 %. Selain itu, 98 % karena kepatuhan menjadi 47 % dan pertimbangan kesetiaan dari 96 % menjadi 34 % setelah pelaksanaan sosialisasi. Selain ASN, pertimbangan aparat desa juga mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata 44 %. Data tersebut juga menunjukkan bahwa preferensi politik ASN dan aparat desa yang masih mempertimbangkan aspek ketatan, kepatuhan dan kesetiaan dengan representasi rata-rata 39,5 % peserta sosialisasi akan cenderung tidak netral dalam Pemilu serentak tahun 2024.

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAP SELANJUTNYA**

Berdasarkan pada pencapaian dari hasil pengabdian diatas maka rekomendasi untuk rencana tahap selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi kelembagaan berkelanjutan antara pihak Jurusan IHK Prodi PPKn dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait netralitas aparatur birokrasi berdomisili di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara.
- b. Hasil pengabdian ini akan dijurnalkan ke jurnal nasional yang bereputasi agar bisa menjadi rujukan bagi setiap orang yang yang melakukan pengabdian tentang netralitas birokrasi dalam Pemilu.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Masih terdapat 39,5 % peserta sosialisasi yang cenderung tidak netral dalam Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolanego. Namun demikian, kegiatan pengabdian dikategorikan berhasil dan efektif dalam memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi, dengan alternatif pengautan nilai salbiya dapat mencari alternatif bagi aparatur birokrasi (ASN dan aparat Desa) untuk tetap memegang teguh aturan main dalam Pemilu. Artikulasi dan penerapan ketataan dan kepatuhan dalam agenda kepantasan, keteguhan prinsip, konsistensi aturan serta peran *tau'wa* menjadi alternatif bagi ASN, kepala Desa beserta perangkat desa untuk netral dalam Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, netralitas birokrasi bukan hanya didekatkan pada pendekatan hukum positif negara, namun lingkungan kontekstual/ kharifan atas lokalitas Gorontalo dapat dijadikan alternatif dalam penguatan aparatur birokrasi dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

#### **7.2 Saran**

Berdasarkan pada Kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, diantaranya adalah :

- a. Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango harus melakukan penguatan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal agar mudah dicerna oleh aparatur birokrasi.
- b. Khusus untuk lembaga dalam hal ini adalah Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan (IHK) Prodi. PPKn untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Netralitas Birokrasi dalam Pemilu.

#### **7.3 Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango beserta staf dan jajaran, LP2M Universitas Negeri Gorontalo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Pemerintah Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara atas dukungan dalam pelaksanaan Pengabdian.

### Daftar Pustaka

- Adi, S. et al., 2021. Asymmetric Election: Political Decentralization As A Lesson Learnt From Indonesia 2019 Simultaneous Election Problems. *Jurnal Studi Pemerintahan*, pp. 220-241.
- Atabik, A., 2014. Telah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat. *Jurnal Fikrah*.
- Baruadi, K., 2012. Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo. *Jurnal EI Harakah*.
- Bidja, I., 2022. Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), pp. 2034-2041.
- Edward, A. & Ward, B., 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: YOI.
- Gehlbach, S. & Simpser, A., 2015. Electoral Manipulation as Bureaucratic Control. *American Journal of Political Science*, pp. 212-224.
- Gie, L., 1992. *Administrasi Perkantoran Modern*. 4 penyunt. Yogyakarta: Liberty.
- Haga, B. J., 1981. *Lima Pohalaa (Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo)*. Jakarta: INC.
- Jeong, G. H., 2016. Electoral Rules and Bureaucratic Effectiveness. *P&P: Politics & Policy*, pp. 1089-1115.
- Koentjaraningrat, 2000. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aneka Cipta\.
- Mahmud, R., Alhadar, S. & Wantu, A., 2021. Perspektif Perilaku Sosiologis Birokrasi Dalam Pemilu (Studi Perilaku Politik ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo). *Jurnal Politico*.
- Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R. & Adhani, Y., 2022. Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalmeo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Mahmud, R., Wantu, S. M., Hamim, U. & Polone, P., 2022. Sosialisasi Penguatan Preferensi Politik Siswa Sma Negeri 1 Pinogaluman Menjelang Pemilu Serentak 2024. *J. Dinamika*, 7(3), pp. 526-532.
- Mahmud, R., Yunus, R. & Adjie, Z., 2022. Alternative in strengthening bureaucratic neutrality through political culture in the 2019 election in Boalemo Regency. *Inovasi : Politik dan Kebijakan*.
- Ndraha, T., 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Niode, A., 2007. Dalam: *Gorontalo Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*. Jakarta: Pustaka Unonesia Press.

- Pamudji, S., 1993. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Porter, E. & Rogowski, J. C., 2018. Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, pp. 602-617.
- Ramadhanil, F., Jurnaedi, V. & Ibrohim, 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. 1 penyunt. Jakarta: Kemitraan Partnership dan Perludem.
- Riggs, F. W., 1996. *Administrasi Pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Sarker, M., Sultana, Y. & Prodhana, A., 2017. Problems and Challenges of Public Administration in Bangladesh: Pathway to Sustainable Development. *International Journal of Public Administration and Policy Research*, pp. 16-25.
- Siagian, S. P., 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singh, R., 2019. Coalition Politics in Contemporary India: Development and Dimensions. *Jurnal Studi Pemerintahan*, pp. 19-30.
- Surie, H. G., 1987. *Ilmu Administrasi negara*. Jakarta: Gramedia.
- Thoha, M., 2014. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. 23 penyunt. Jakarta: Rajawali Press.
- Wen-Sihen, P., 2008. A Critique Of Fred W. Riggs' Ecology Of Public Administration. *Publik Administratuin Quarterly*, pp. 528-548.



## PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Pengalaman Pekerjaan
1	Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023
2	Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023
3	Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Baawslu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
4	Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Gorontalo Tahun 2024
5	TOT Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahap Ke II Tahun 2024
6	Dosen tetap Bidang Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Gorontalo
7	Ketua Tim Pemetaan Stabilitas Politik Menjelang Pemilu 2019 di Kabupataen Boalemo Tahun 2018
8	Tim Penyusunan Naskah Akadmeik Ranperda Peralihan Kantor kesbangpol dan Linmas Menjadi Badan Kesbangpol Kabupaten Boalemo Tahun 2019
9	Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda Aset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021
10	Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda Indsutri Kabupaten Boalemo Tahun 2021
11	Sekretarus Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK-UNG) 20021
12	Ketua Tim Penyusunan Standar Harga dan Barang Provinsi Gorontalo Tahun 2024
13	Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK-UNG) 20024

## PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2023	Budaya Politik Birokrasi Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	Ketua	PNBP UNG	Jurnal
2022	Perilaku Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Administrasi Publik di Kabupaten Boalemo			Disertasi
2022	Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	Anggota	PNBP FIS	Jurnal
2021	Perilaku Birokrasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Administrasi Publik di Kabupaten Boalemo	-	-	Disertasi
2020	Penguatan Demokrasi Lokal "Studi Orientasi Budaya Politik Masyarakat Pesisir di Kecamatan Dulupi"	Anggota	PNBP FIS	Jurnal
2018	Pemetaan Stabilitas Politik Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	Ketua	APBD Kabupaten Boalemo	Laporan dan Rekomendasi
2018	Orientasi Budaya Politik Perempuan "Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial pada Pemilu 2019"	Anggota	PNBP FIS	Jurnal

2017	Reformasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Gorontalo)	Anggota	PNBP FIS	Jurnal
2017	Survei Opini Publik Kecenderungan Peralihan Pilihan Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Gorontalo	Ketua	Partai Politik	Laporan dan Rekomendasi
2016	Orientasi Perilaku Politik Pemula Pada Pemilihan Gubernur Gorontalo Tahun 2017 di Kota Gorontalo	Anggota	PNBP FIS	Jurnal
2009	Perilaku Politik Masyarakat Gorontalo Pada Pilkada 2008 di Kota Gorontalo			Tesis

#### KARYA TULIS/PUBLIKASI

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2021	Implementasi Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler Di Sma Negeri 1 Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Jambura Journal Civic Education
2020	<i>Strengthening Local Democracy (Orientation Study of Political Culture of Coastal Communities in Dulupi District, Boalemo Regency)</i>	<i>International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding</i>
2019	<i>Struggle of the Local Elite in Gorontalo</i>	<i>International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding</i>
2019	Orientasi Budaya Politik Perempuan ”Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial pada Pemilu 2019”	Jurnal Politico Unsrat Manado
2020	Politisasi Birokrasi ( <i>Studi Netralitas Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo</i> )	Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo
2017	Orientasi Budaya Politik Pemilih Pemula	Jurnal Legalitas

2021	Perspektif Perilaku Sosiologis Birokrasi Dalam Pemilu (Studi Perilaku Politik ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo)	Jurnal Politico Unsrat Manado
2022	Internalization of Salbia Value in Strengthening Bureaucratic Neutrality during Election in Gorontalo Province	Review Of International Geographical Education
2022	Alternatif Penguatan Netralitas Birokrasi Melalui Budaya Politik Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	Inovasi : Jurnal Politik dan Kebijakan
2022	Perilaku Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
2022	<a href="#">Sosialisasi: “Santri Bertanya Pemilu Menjawab “Bagi Santri Di Pondok Pesantren Alkhairaat Kota Gorontalo</a>	AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
2022	Penguatan Preferensi Politik Siswa SMA Negeri 1 Pinogaluman Menjelang Pemilu Serentak 2024	Jurnal : J. Dinamika
2022	Penguatan Perilaku Salbia sebagai Alternatif Sikap Rasional Birokrasi Dalam Pemilihan Umum	Jurnal Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Universitas Negeri Malang
2022	Strategi Kemenangan PDIP Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara	Jambura Journal Civic Education
2022	Struggle Of The Local Elite In Gorontalo	HKI
2022	Perilaku Birokrasi Pada Pemilihan Umum 2019 Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Kabupaten Boalemo	HKI
2023	Pendidikan Politik Bagi Siswa di SMA Negeri 1 Telaga Menjelang Pemilu Serentak 2024	Community Development Journal
2023	Penguatan Literasi Siswa Menjadi Pemilih Cerdas Menjelang Pemilu 2024 di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo	Community Development Journal
2023	<a href="#">Orientasi Politik Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 Di SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai</a>	Innovative: Journal Of Social Science Research

2023	<a href="#">Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo</a>	Innovative: Journal Of Social Science Research
2023	<a href="#">Budaya Politik Masyarakat Desa Tonala (Studi Pemilihan Sangadi Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022)</a>	Innovative: Journal Of Social Science Research
2023	Strategi Politik Pemenangan Dedi Hamzah pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	Jurnal Kewarganegaraan
2023	Siswa Bertanya Pemilu Menjawab: Penguatan Pengawasan Partisipatif Bagi Siswa Di Sma Negeri 11 Gorontalo Utara	Community Development Journal : Jurnal Pengabdian masyarakat
2023	Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi	Samudra Biru Jogjakarta
2023	Birokrasi Vs Pemilu ( Membaca Indonesia Dari Boalemo)	Samudra Biru Jogjakarta
2024	Party change and electoral performance: assessing the impact of intraparty conflict on the Democrat and Hanura parties	Otoritas (Jurnal Ilmu Pemerintahan)
2024	Perilaku Birokrasi Tenaga Non ASN BAWASLU dalam Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi Gorontalo	Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2021	Pengelolaan BumDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato	Jambura Journal Civic Education
2021	Penanaman Karakter Bagi Siswa di SMA Negeri 1 Dulupi Kabupaten Boalemo	Jurnal Abdidas
2021	Penguatan Kelembagaan Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayak Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Jurnal Abdidas
2022	<a href="#">Mongubingo Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Adat Gorontalo</a>	Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan
2022	Menumbuhkan Kesadaran Toleransi Pada Masyarakat Majemuk di Universitas Negeri Manado	Jurnal Abdimas Terapan

2022	Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Jambura Journal Civic Education
2022	Penguatan Kelembagaan BumDes Bersama Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Jurnal Abdidas
2023	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Gula Semut Berbasis Digital Marketing	Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat
2023	Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito	Jurnal Kewarganegaraan
2023	<a href="#">Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo</a>	JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
2024	Public Administration Analysis of Bleaching Motorized Vehicle Tax in Gorontalo Province	International Journal of Religion
2024	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango	Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
2024	Kualitas Pelayanan Publik Pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
2024	Upaya Pemerintah Desa Lion Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow	Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran

**PENGALAMAN PENGABDIAN/ PEMBICARA**

:

<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Pembicara</b>
2024	Budaya Politik Gorontalo	RRI Gorontalo	Narasumber
2024	Forum Warga Sebagai Model Pengawasan PEMILU Partisipatif	Bawaslu Kab. Bone Bolango	Narasumber
2024	Strategi Pencegahan dan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Daerah Secara Langsung Tahun 2024	Bawaslu Kab. Gorontalo	Narasumber
2024	Peran Strategis Masyarakat Mengawal Pemilu dan Pemilihan Yang Inklusif dan Berintegritas	Bawaslu Provinsi Gorontalo	Narasumber
2024	Urgensi Preferensi Politik Politik Kebangsaan Menjelang Pilkada 2024 (Perspekif Ke-Aku-an Vs Ke-Kita-an)	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKn UNiversitas Hairun Ternate (UNHAIR)	Narasumber
2024	Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Bermartabat	Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Narasumber
2024	MODULOHUPA : Alternatif Penguatan Kapasitas Komunikasi Eefektif Dalam Kelembagaan Badan AD HOC	KPU Kota Gorontalo	Narasumber
2024	MODULOHUPA : Catatan Integritas dan Netralitas Ad Hoc (PPK) Menjelang Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Boalemo	KPU Boalemo	Narasumber
2024	Meneropong Catatan Pemilu 2024 Menuju Pilkada Dalam Perspektif	KPU Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2024	Profesionalitas Penyelenggara Adhoc Pilkada 2024	KPU Kabupaten Gorontalo utara	Narasumber
2024	MODULOHUPA : Catatan Penegakan Keadilan Pemilu Serta Pengaruh Lokal Wisdome Pada Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Boalemo	Bawaslu Kab. Boalemo	Narasumber
2024	Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU	KPU Provinsi Gorontalo	Narasumber

2024	Tahapan Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU	KPU Provinsi Gorontalo	Narasumber
2024	Peran Milenial Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024	KPU Pohuwato	Narasumber
2024	Urgensi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum 2024	Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Narasumber
2024	Membangun Kesadaran Kritis Bagi UMKM Terhadap Pengawasan Pemilu Partisipatif	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2024	Penguatan Kapasitas Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Masa Kampanye	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2024	Membangun Mindset Pengawasan Partisipatif Dalam Perspektif Budaya Politik Multikultural	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2024	Pengawasan Partisipatif : Mengawal Demokrasi	Bawaslu Kota Gorontalo	Narasumber
2024	Penguatan Prefrensi Politik Anak Muda	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Perspektif Salbia Sebagai Alternatif Penguatan Prefrensi Politik Paguyuban Mahasiswa Menuju Pemilu Berintegritas Tahun 2024 di Kabupaten Pohuwato	KPU Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	MODULOHUPA” Sebagai Alterbatif Penyelesaian Sengketa Proses Dalam Tahapan Kampanye Bagi Bawaslu dan Panwascam di Kabupaten Pohuwato	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Membangun Mindset Pengawasan Partisipatif Untuk Merangsang Keterlibatan Publik	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Modulohupa Sebagai Model Penguatan PPK Menuju Pemilu Berintegritas	KPU Kabupaten Boane Bolango	Narasumber
2023	Peran Perguruan Tinggi Dalam Perekrutan KPPS	KPU Kabupeten Gorontalo	Narasumber
2023	Jenis Larangan Dan Sanksi Pidana Pada Tahapan Kampanye Pemilu 2024	Bawaslu Kota Gorontalo	Narasumber
2023	Perspektif Modulohupa Sebagai Model Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Bagi Panwaslu Kelurahan/ Desa Di Kabupaten Bone Bolango	Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Narasumber

2023	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa Antar Peserta Pemilu & Teknis Penyelesaiannya (Perspektif Modulohupa)	Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Narasumber
2023	Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Bagi Panwascam dan Partai Politik se Kabupaten Boalemo	Bawaslu Kabupaten Boalemo	Narasumber
2023	Strategi Pengawasan dan Pencegahan Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024	Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Narasumber
2023	Penguatan Perilaku Rasionalitas Pemilih disabilitas sebagai agen pengawasan partisipatif	Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Narasumber
2023	Preferensi Politik Siswa Sebagai Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024	Prodi S1. PPKn UNG	Narasumber
2023	Kolektifitas media sebagai agen pengawasan partisipatif	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Penguatan Perilaku Politik Masyarakat Nelayan Sebagai Agen Pengawasan Partisipatif	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Penguatan Masyarakat Adat Terpencil Sebagai Agen Pengawasan Partrisipatif Menjelang Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Narasumber
2023	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa Antar Peserta Pemilu & Teknis Penyelesaiannya (Perspektif Modulohupa)	Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Narasumber
2023	Penguatan Kader Desa Sebagai Agen Pengawasan Partisipatif		Narasumber
2023	Penguatan Rasionalitas Pemilih Disabilitas Sebagai Agen Pengawasan Partisipatif	Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Narasumber
2023	Strategi Pengawasan dan Pencegahan Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024 (Perspektif Modulohupa)	Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Narasumber
2023	Alternatif Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Bawaslu Provinsi Gorontalo	Narasumber
2023	Forum Warga Sebagai Model Pengawasan PEMILU Partisipatif	Bawaslu Provinsi Gorontalo	Narasumber

2023	Anak Muda Dalam Arena Kompetisi Pemilu Yang Berkualitas	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Salam Awas Perempuan Gorontalo	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Penguatan Perilaku Politik Masyarakat Nelayan Sebagai Agen Pengawasan Partisipatif	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Kolektifitas media sebagai agen pengawasan partisipatif	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Penanganan Pelanggaran Dalam Perspektif Pengawasan Pasrtisipatif	Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Pemilu berintegritas dalam bingkai PKPU NO. 6 tahun 2022	KPU Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa Antar Peserta Pemilu & Teknis Penyelesaiannya ( <i>Perspektif Modulohupa</i> )	Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Narasumber
2023	Penguatan Masyarakat Adat Terpencil Sebagai Agen Pengawasan Partisipatif Menjelang Pemilu Serentak 2024	Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Narasumber
2023	Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Anak Muda	Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Narasumber
2023	Potensi Pelanggaran Dalam Tahapan Kampanye	Bawaslu Kabupaten Boalemo	Narasumber
2023	Strategi Pengawasan dan Pencegahan Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024 ( <i>Perspektif Modulohupa</i> )	Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Narasumber
2023	Anak Muda Dalam Arena Kompetisi Pemilu Yang Berkualiras	KPU Kabupaten Gorontalo	Narasumber
2023	Membedah partai politik dan sistem kepartaian di indonesia	Kosgoro Provinsi Gorontalo	Narasumber
2023	Pemilu Berintegritas dalam Bingkai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022	KPU Kabupaten Pohuwato	Narasumber
2023	Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Anak Muda	Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara	Narasumber
2023	Dapil dan Alokasi Kursi (Pemuda Dalam Arena Kompetisi Pemilu Yang Berintegritas)	KPU Kabupaten Gorontalo	Narasumber
2022	Membangun Sinergitas Pengawasan Pemilu Untuk	Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Narasumber

	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat		
2022	Preferensi Politik Pemilih Pemula di Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondoe Utara	Prodi PPKn UNG	Narasumber
2022	Penguatan Preferensi Politik Bagi Siswa SMA Negeri 1 Ponogaluman Menjelang Pemilu 2024	Kerjasama Prodi PPKn UNG dengan Sma Negeri 1 Pinogaluman	Narasumber
2022	Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penghapusan Tenaga Honorer Daerah	PT. Mimoza Mitra Media	Narasumber
2022	FGD Demokrasi : Strategi Menangkal Radikalisme Dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Gorontalo	Cipayung Plus Provinsi Gorontalo Kerjasama Kesabangpol Provinsi Gorontalo	Narasumber
2022	Wibinar Nasional Pemilu dan Netralitas Birokrasi. Catatan Netralitas Birokrasi Menuju Pemilu Serentak 2024	Program Doktor Administrasi Publik UNG	Narasumber
2022	Exclusive Class : Transformasi Manajemen Informasi Publik Menuju Pemilih Pemula yang berkualitas	S1 Administrasi Publik UNBITA	Narasumber
2022	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Menghadapai Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Serentak Tahun 2024	Bawaslu Provinsi Gorontalo	Narasumber
2022	Kuliah Tamu : Dilema Birokrasi Dalam Pemilu	S1 Administrasi Publik UNBITA	Narasumber
2022	Dialog Fokus : Hakikat Demokrasi dan Isu Penundaan Pemilu	FISIP Unisan	Narasumber
2020	Wibiner nasional Dilema Pilkada Di Tengah Covid-19	Prodi PPKN FIS UNG	Narasumber
2020	Wawasan Politik Organisasi dan Manajemen Konflik	KPA FKMM	Narasumber
2020	Webbinar Eenergi Pancasila di Tengah Pandemi	Netfid Gorontalo	Narasumber

2020	Politik Kebangsaan Di Tengah Pandemi Covid 1	Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo	Narasumber
2020	Pilkada dan Keselamatan Pemilu	IKA-PMII Provinsi Gorontalo	Narasumber
2019	Pendidikan Politik	Elnino Center	Narasumber
2019	Mengembangkan Potensi dan Tata Kelola Administrasi	HMJ Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan	Narasumber
2018	Pendidikan Politik Generasi Milenial di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo	FIS UNG	Narasumber
2018	Manajemen Kepemimpinan	Persatuan Pelajar Islam Al Khairat Kota Gorontalo	Narasumber
2018	Rasionalisasi Rekrutmen Seleksi Dan Penilaian Bakal Calon Legislatif	DPW PPP Provinsi Gorontalo	Narasumber
2018	Cara Mempengaruhi Perilaku Pemilu 2019	DPW PPP Provinsi Gorontalo	Narasumber
2018	Penguatan Karakter Mahasiswa	HMJ Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan	Narasumber
2016	Manajemen Kepemimpinan	Senat Mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ipa UNG	Narasumber
2018	Penguatan Nilai Pancasila Dalam Membangkitkan Semangat Generasi Bangsa	HMJ Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan	Narasumber
2016	Peran Pemerintah Desa Torosiaje Dalam Pembangunan Desa	Mapala Butaiyo Nusa FIS UNG	Narasumber
2016	Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan Lingkungan di provinsi Gorontalo	Mapala Butaiyo Nusa FIS UNG	Narasumber
2016	Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah	HIPMI MALUT Gorontalo	Narasumber

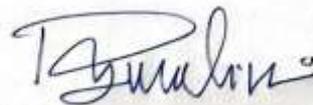
#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
-----	-----------------	---------	-------

1	Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan UNG	Ketua	2003-2004
2	Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim (FKMM)	Ketua	2004-2005
3	Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo	Presiden BEM	2006-2007
4	Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo	Anggota	2015-2020
5	Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo	Sekretaris Umum Wilayah Gorontalo	2021-2025
6	Yayasan Payu Limo Totalu	Ketua Dewan Pembina	2022-2026
7	Ikatan Alumni Universitas Negeri Gorontalo	Ketua Bidang Pengkajian Politik, Kebijakan dan Hukum	2022-2024

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Gorontalo, 2024  
Yang membuat pernyataan,



**(Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, M.A)**